

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial yang di hadapi oleh bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Data bulan Maret tahun 2010 pada Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sekitar 16,59 persen. Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan terpusat di daerah Pedesaan khusus provinsi Gorontalo dengan tingkat kemiskinan sebesar 30,89 dari jumlah total penduduk pedesaan yang ada di provinsi Gorontalo.

Terjadinya kemiskinan ini di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak adanya sumber daya manusia yang handal dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia, selain itu tidak adanya sarana penunjang untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, selain itu masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari berbagai masalah kemiskinan sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah adalah sangat penting dilakukan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan pemerintah.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, antara lain: Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (TPSPKUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) dan Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Sejak tahun 2007 pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang melibatkan masyarakat secara penuh dalam kegiatan pengentasan kemiskinan ini yaitu Program PNPM Mandiri.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan menjadi salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan, karena ternyata kawasan pedesaan merupakan basis masyarakat miskin. Kebijakan PNPM Mandiri dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo membuat derivasi kebijakan melalui SK Bupati No 119/07/111/2011 tentang pembentukan UPK tingkat kecamatan, yang notabene sebagai unit pengelola kegiatan pelaksanaan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kabupaten Gorontalo.

Untuk Kabupaten Gorontalo kebijakan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Khusus tahun 2011 Kabupaten Gorontalo memperoleh Dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.23.963.000.000,- yang di sebar 17 Kecamatan antara lain Kecamatan Asparaga, Batudaa, Batudaa Pantai, Biluhu, Boliyohuto, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Pulubala, Tabongo, Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tibawa, Tilango dan Tolangohula. Khusus kecamatan Asparaga yang memperoleh bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Sejak tahun 2009. Jika diakumulasi secara keseluruhan sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 maka dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga sebesar Rp. 4.500.000.000.-.

Berbagai bentuk kegiatan yang telah di implementasi melalui kebijakan PNPM Mandiri dan telah dilaksanakan sejak tahun 2009 di Desa Bululi, Karya Indah, Mohiyolo, dan Pangahu di kecamatan Asparaga. Berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gorontalo khususnya di Kecamatan Asparaga, telah dilakukan beberapa kegiatan: 1) Kegiatan Fisik, Meliputi a) Pembukaan akses Jalan yang menghubungkan antar desa diantaranya Infrastruktur Jalan Penghubung Antara Desa Mohiyolo dengan Bontula kemudian Mohiyolo dengan Pangahu. b). Pembuatan Drainase di Desa Mohiyolo, c). Pembuatan Sekolah Paud di Desa Mohiyolo. Dan 2) Kegiatan Non Fisik, Meliputi a) SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau pada aplikasinya disebut dengan SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) yang tersebar di 10 Desa se – Kecamatan Asparaga. b) Program Paket Beasiswa Khusus anak sekolah dan Transportasi Guru.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan pengakuan beberapa tokoh masyarakat setempat bahwa mereka sangat berterimah kasih akan adanya program PNPM Mandiri Perdesaan. Ini karena mereka mengaku sangat di hargai dengan melibatkan mereka untuk mengelola langsung bantuan tersebut, mulaidari perumusan kegiatan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi mereka dilibatkan. Dalam pengelolaan kegiatan yang di biyai oleh program pemerintah ditemukan ada sebagian masyarakat yang menyalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh di seluruh desa di kecamatan Asparaga yaitu Simpan Pinjam Perempuan(SPP) atau yang dimaksud dengan SPKP (Simpan Pijam Khusus Perempuan) yang merupakan program pemberdayaan khusus kelompok perempuan dengan total anggrannya 25 persen dari BLM melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang di berikan kesetiap kecamatan. Khusus di kecamatan Asparaga setiap kelompok SPKP rata – rata memperoleh anggaran sebesar Rp.25.000.000. diantaranya Desa Bululi, Mohiyolo, Karya Indah, Karya Baru, Tiohu, Bonthula, Prima, dan Pangahu. Program ini setiap tahunnya selalu di gulirkan kepada kelompok baru yang ada di desa tersebut, Namun kenyataan menunjukkan bahwa implementasi dilapangan tidak demikian, di temukan beragam masalah salah satunya penyelewengan dana oleh pengurus kelompok maupun kelompok itu sendiri.

Fenomena yang terjadi, menurut peneliti disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum adanya keseriusan dari masyarakat terhadap program ini. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pemberian bantuan oleh pemerintah tidak perlu di kembalikan. Disamping itu, faktor kurangnya SDM

dalam pengelolaan program yang dapat dilihat dari minimnya dukungan dari pemerintah desa terutama dalam penyampaian/sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya keseriusan masyarakat terhadap prgram PNPM Mandiri Perdesaan
2. Ada sebagian masyarakat yang telah menyalahgunakan program ini untuk kepentingan pribadi
3. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi program PNPM Mandiri Pedesaan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.
2. Faktor–faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo
3. Seberapa jauh PNPM Mandiri Perdesaan mengentakan Kemiskinan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Proses Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.

2. Menaganalisis Faktor–faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo.
3. Menganalisis dampak PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Asparag Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Asparaga

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rekomendasi sebagai masukan kepada para pengambil kebijakan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan program pengentasan kemiskinan.
- b) Sedangkan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap kajian yang berhubungan dengan kebijakan Pengentasan kemiskinan, berikut sebagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan program pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam kajian bidang ilmu administrasi publik.
- b) Merupakan kajian untuk pemerhati dan peneliti lain, khusus di bidang ilmu administrasi publik, guna pengembangan konsep teoritis

dalam mengembangkan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.